

**MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA KONFLIK
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Tim Peneliti:

Ketua : Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si / NIDN : 0001057901
Anggota : Dr. Azhar, SH, M.Sc, LL.M, LL.D / NIDN : 0012057802
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM / NIDN : 0009026012

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF**

1. Judul Penelitian : Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bidang Penelitian : Sosial Humaniora
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP / NIDN : 197905012002121005
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina /IVa
 - e. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan Administrasi Publik
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 - h. Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Publik
 - i. Alamat Kantor : Jl. Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya (OI)
 - j. Telepon/faks : (0711) 580572 / (0711) 580572
 - k. Alamat : Jalan Kebun Bunga Km 9 No.1830 Palembang
 - l. Telepon/HP/E-Mail : 081233436512 / andries_lionardo@yahoo.co.id
1. Jangka Waktu Penelitian : 1 (satu) Tahun
2. Jumlah biaya yang diterima : Rp. 59.000.000,-
(Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Mengetahui
Ketua UPPM Fakultas



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP.,M.AP
NIP. 198701052015041003

Palembang, 11 Mei 2023

Ketua Peneliti



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP.197905012002121005

Mengetahui
Dekan



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Usulan: Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Ketua Peneliti:
 - a) Nama lengkap : Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
 - b) Bidang keahlian : Kebijakan Publik
3. Anggota Peneliti :

No	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi	Curahan Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Azhar, SH, M.Sc, LL.M, LL.D	Hukum Pemerintahan Daerah/	FISIP	6
2	Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM	Administrasi Publik	FISIP	6

4. Isu Strategis: Kebijakan Ketenagakerjaan
5. Topik Penelitian : Menganalisis secara konseptual Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
6. Objek Penelitian: Masyarakat (pekerja) yang berkonflik dalam kasus Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
7. Lokasi Penelitian: Kantor Dinas Tenaga Kerja dan beberapa perusahaan di Kabupaten Banyuasin.
8. Hasil yang ditargetkan : Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimana luaran penelitian akan berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.
9. Institusi lain yang terlibat: Keterlibatan institusi lain pada penelitian ini bukan sebagai mitra kerjasama melainkan sebagai objek kajian penelitian.
10. Sumber biaya lain: Tidak ada.

RINGKASAN

Judul penelitian ini adalah Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan solusi atas Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik Smith, Ripley dan Van Horn. Rujukan RIP (Renstra) Penelitian Universitas Sriwijaya penelitian ini berada pada *cluster research* untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat kaji tindak pada bidang sosial ekonomi, rancang bangun serta pengembangan model interaksi perilaku masyarakat untuk membangun karakter bangsa. *Road-map* penelitian ini juga berjalan searah dengan SDGs. Tujuan 8 yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Informan penelitian ditentukan dengan sesuai dengan tema yang relevan dan masalah penelitian di lapangan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Konflik Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS PENELITIAN	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Urgensi Penelitian Dengan Skema Penelitian Unggulan Kompetitif.....	4
1.6. Keterkaitan Topik Penelitian Dengan Renstra dan RIP Unsri.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Konsep Kebijakan Publik.....	6
2.2. Konsep Ketenagakerjaan	9
2.3. <i>Road-Map Research</i> (Peta Jalan Penelitian).....	16
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Desain Penelitian.....	12
3.2. Unit Analisis Penelitian.....	12
3.3. Penentuan Informan Penelitian.....	14
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	14
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.6. Teknik Keabsahan Data.....	17
3.7. Teknik Analisis Data	18
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	19
4.1. Luaran Penelitian.....	19
4.2. Target Capaian Penelitian.....	20
BAB V RENCANA ANGGARAN BIAYA	21
5.1. Anggaran Biaya Penelitian.....	21
BAB VI JADWAL PENELITIAN DAN IDENTITAS PENELITI	22
6.1. Jadwal Penelitian.....	22
6.2. Identitas Tim Peneliti.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN PENELITIAN	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tercapai dengan adanya penguatan kapasitas organisasi Pemerintahan Daerah dan optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan. Penguatan kapasitas organisasi pemerintahan daerah menyangkut bagaimana penerapan model penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kapasitas Pemerintah Daerah. Sedangkan, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan menyangkut bagaimana terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang demokratis. Jika dilihat kondisi saat ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami pergeseran model dari *structural efficiency model* menjadi *local democracy model* (Thoha, 2008 : 55).

Pergeseran paradigma di atas menggambarkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lebih kepada pemenuhan pluralitas aspirasi masyarakat lokal. Dalam rangka menjawab kebutuhan lokal masyarakat, maka dituntut akuntabilitas Pemerintah Daerah secara nyata. Substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah juga terorientasi kepada upaya penguatan mekanisme, pencapaian nilai dan peran aktor yang terlibat dalam pembangunan daerah. Dalam perspektif ini, filosofi yang dimunculkan adalah menyangkut persoalan pengelolaan keanekaragaman, perubahan paradigma politik, penekanan paradigma ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah di Indonesia saat ini menyangkut dua aspek yakni pelaksanaan urusan pilihan (*optional services*) dan urusan wajib (*obligatory services*). Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, tidak semua daerah mempunyai cakupan dan jenis urusan yang sama, tetapi sangat tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Sedangkan, urusan wajib adalah urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar dan menciptakan standarisasi pelayanan publik diseluruh Indonesia. Dalam penyelenggaraan urusan wajib koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/ kota adalah instrumen pemerintah yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena urusan yang dikelola tersebut lebih bersifat *concurrent* yakni urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dijelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan efisiensi, inovasi, dan "*locality*". Pemerintah Daerah juga dituntut harus dapat menciptakan kebijakan publik yang berorientasi kepada pelayanan dan kepentingan publik yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seluas-luasnya seperti dalam mengelola SDA, SDM dan keuangan daerah.

Dalam rangka memenuhi harapan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi pembangunan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pertama, eksternalitas yakni pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan pusat. Secara teoritik, instrumen ini lebih mengarah kepada capaian pembangunan melalui pendekatan teori ekonomi.

Kedua, akuntabilitas yakni pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung atau lebih dekat dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut. Jadi, akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat akan lebih terjamin. Instrumen ini lebih mengarah kepada capaian pembangunan melalui pendekatan teori demokrasi. Ketiga, efisiensi yakni pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Arti penting dimensi pembangunan di atas adalah terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang didasarkan atas pertanggungjawaban yang nyata (*the real accountability*) dengan menjelaskan seberapa jauh capaian kebijakan lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat. Terkait dengan hal tersebut, Schacter (2000:5) menjelaskan bahwa fungsi pemerintah sesungguhnya adalah *to explain and justify publicly the way its uses its power, and take prompt corrective action when things go wrong*. Akuntabilitas pemerintah juga harus dimaknai dan dirumuskan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dan menggugat peran pemerintah yang selama ini cenderung menciptakan kesalahan administrasi (*maladministration*) dalam melayani masyarakat, ketimbang berorientasi kepada akuntabilitas publik (*public accountability*). Pentingnya akuntabilitas Pemerintah Daerah juga ditegaskan oleh Ranson dan Stewart (1994 : 222) yang menguraikan bahwa "*public accountability can constitute the necessary condition for the duality of publicness. It can help to institutionalise both an active citizenship and the process of collective choice in local government*". Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa aktualisasi teori akuntabilitas merupakan rangkaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya bidang ketenagakerjaan.

Kajian akuntabilitas Pemerintah Daerah juga terletak pada aktivitas fungsional informasi (*information function*) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dan aktivitas fungsional tindakan yang berkaitan dengan kemampuan menilai dan mengajukan sejumlah tuntutan (*demands*) tertentu terhadap kebijakan atau kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Argumentasi ini diperkuat oleh pendapat Salleh dan Iqbal (Salleh dan Iqbal, 1995 : 6) yang menjelaskan bahwa *accountability can also be regarded as a viable instrument of control which can be operated to extent that public servants understand and acknowledge their assigned responsibility*

for the result. Dalam pemahaman selanjutnya, dinyatakan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berjalan dengan baik, jika Pemerintah Daerah selaku aktor kebijakannya memiliki tujuan dan misi yang jelas terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam ranah inilah kebijakan daerah yang dibuat harus tepat sasaran, berkeadilan, demokratis, dan akuntabel.

Prinsip penting teori akuntabilitas sangat tergantung dengan tipologi (jenis) akuntabilitas itu sendiri. Hanya saja, pembedaannya ada pada implementasi teori akuntabilitas tersebut apakah penerapannya ada pada domain *government*, *private* ataukah *civil society*. Menurut Yango (dalam LAN dan BPKP, 2000 :26-27) terdapat beberapa jenis akuntabilitas organisasi publik. Pertama, *regulatory accountability* yakni sebuah model akuntabilitas yang memfokuskan pada transaksi-transaksi reguler atau fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Kedua, *managerial accountability* yakni sebuah model akuntabilitas yang memfokuskan pada efisiensi penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta peranan manajer atau pengawas dalam mengelola bawahannya untuk tidak hanya taat terhadap peraturan, tetapi juga memiliki tahapan-tahapan yang berkelanjutan sebagai upaya memberikan pelayanan prima. Ciri utama tipe ini adalah efisiensi penggunaan *resources*. Ketiga, *program accountability* yakni sebuah model akuntabilitas yang menitikberatkan pada sejauhmana pencapaian hasil program-program yang dijalankan oleh organisasi publik. Keempat, *process accountability* yakni model pertanggungjawaban akan pemberian informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi publik. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya pada kondisi sosial.

Paul (dalam LAN dan BPKP, 2000 : 28) juga mengklasifikasikan *accountability* dalam beberapa tipe. Pertama, *democratic accountability* adalah model akuntabilitas demokrasi sebagai penggabungan antara akuntabilitas politik dan akuntabilitas administrasi. Pemerintah yang akuntabel atas capaian kinerja dapat dilihat dari semua kegiatannya sebagai pemimpin daerah (pejabat politik) yang dipilih rakyat. Kedua, *profesional accountability* adalah model akuntabilitas yang berkaitan dengan kemampuan profesional para pakar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesi. Mereka diperkenankan untuk menentukan *public interest* sesuai dengan norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, *legal accountability* adalah model pertanggungjawaban yang berimplikasi terhadap pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang memang dituntut oleh semua masyarakat. Penggolongan akuntabilitas ini tentunya dapat mengawal proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia. Sedangkan, Jabra dan Dwivedi (1989) mengembangkan lima macam jenis akuntabilitas yang meliputi akuntabilitas administrasi (*administrative accountability*), akuntabilitas legal (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), akuntabilitas profesional (*professional accountability*), dan akuntabilitas moral (*moral accountability*).

Penelusuran kajian dan penelitian akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam sektor publik selanjutnya dapat ditemukan dalam berbagai jurnal dan tulisan ilmiah. Dari hasil penelusuran kajian yang ada ditemukan bahwa kajian akuntabilitas pemerintah selama ini banyak diuraikan dalam berbagai perspektif dan pendekatan. Misalnya studi yang dilakukan oleh Kloot (2009) dengan judul *“Performance Measurement And Accountability In An Australian Fire Service”*. Dalam penelitian yang dilakukan di Australia ini ditemukan bahwa akuntabilitas pemerintah terhadap pelayanan pemadaman kebakaran selama ini telah berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat (pelanggan). Masyarakat telah dilayani dengan jaminan sistem akuntabilitas administrasi yang berbasis pada pendekatan dan nilai-nilai teori *new public management* (NPM). Kajian ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, kajian akuntabilitas dapat dilihat dari penelitian Sullivan (2009) yang berjudul *“Reciprocal Accountability : Assesing the Accountability Enviroment in Australian Aboriginal Affair Policy”*. Dalam kajian ini ditemukan bahwa pelayanan kependudukan yang diberikan pemerintah federal Australia untuk suku Aborigin belum mengarah kepada keberpihakan warga negara minoritas tersebut. Akibatnya, makna konsep akuntabilitas belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Sementara, dalam kajian yang dilakukan oleh Mosley (2008) yang berjudul *“decentralisation and accountability in labour market policy”* ditemukan bahwa konsep akuntabilitas merupakan elemen kunci Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dan implementasi kebijakan publik sektor ketenagakerjaan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa persoalan teoritis yang muncul dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara khusus mengkaji tentang akuntabilitas politik dan administrasi Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan dalam domain studi administrasi publik. Kajian akuntabilitas yang dilakukan secara umum fokus kajiannya masih didasarkan pada cakupan perspektif ilmu yang beragam, misalnya kerangka ilmu politik, ekonomi pembangunan, ekonomi-politik, dan manajemen publik. Dalam ranah tersebut menjadi penting penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari *“fill in the gap* (ruang kosong)” kajian akuntabilitas Pemerintah Daerah terkait permasalahan empiris sektor ketenagakerjaan dalam bingkai disiplin ilmu administrasi publik.

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji aspek akuntabilitas politik dan administrasi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan salah satu urusan wajib daerah, yakni bidang ketenagakerjaan. Hal ini menarik dilakukan karena sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu tugas Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan hidup melalui mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara empiris, kajian ini menjadi penting dianalisis karena mengingat hampir semua negara di dunia saat ini mengalami kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang semakin hari semakin berkembang. Melalui kajian akuntabilitas ini, secara khusus, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan seefektif mungkin guna memenuhi kepentingan masyarakat lokal (*locality*).

Menurut Silaban (2009: 7) persoalan ketidakberpihakan regulasi kepada kepentingan tenaga kerja akan menyebabkan beberapa persoalan mendasar. Pertama, mandeknya pelaksanaan program ketenagakerjaan yang akan dikembangkan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Secara khusus, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 : Population and Unemployment Rate in Indonesia

No.	Type of Activity	2018	20019	2020	2021	2022
1.	Population	153.923.648	158.491.396	160.811.498	164.118.323	166 641 050
2.	Labor Force	103.973.387	105.857.653	106.388.935	109.941.359	111.947.265
	Labor Force Participation Rate	67.55	66.79	66.16	66.99	67.18
	Working	93.722.036	93.958.387	95.456.935	99.930.217	102.552.750
	Unemployment	10 251 351	11.899.266	10.932.000	10.011.142	9.394.515
	Unemployment Rate	9.86	11.24	10.28	9.11	8.39
3.	Not in Labor Force	49.950.261	52.633.743	54.422.563	54.176.964	54.693.785
	Schooling	11.577.230	13.581.943	13.530.160	13.777.378	13.226.066
	House Keeping	30.877.274	30.619.529	31.977.973	31.989.042	32.770.941
	Others	7.495.757	8 .432.271	8.914.430	8.410.544	8.696.778

Sumber : Data Sekunder diolah.

Di tingkat pemerintahan pusat (*national level*), persoalan utama konflik sektor ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini menyangkut persoalan regulasi. Pemerintah masih lemah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepentingan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari esensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibuat sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 masih belum memenuhi hak-hak normatif masyarakat pekerja dan lebih menguntungkan pelaku bisnis dan industri. Nmaum Undang -Undang Cifta Karya yang baru saja dirumuskan apakah mampu meyelesaikan sengketa konflik tenaga kerja. Regulasi ini menuai konflik yang cukup mendalam di kalangan masyarakat pekerja. Misalnya, di beberapa bagian dijelaskan ketentuan-ketentuan yang terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), pesangon, hak cuti, penggunaan tenaga kontrak dengan model pemborongan pada pihak perusahaan lain (*outsorching*) dan hak mogok kerja yang belum sepenuhnya menguntungkan tenaga kerja. Dengan kata lain, regulasi ini sebagian besar masih menguntungkan pelaku bisnis dan industri, ketimbang tenaga kerja.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah “Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai pengkayaan kajian kebijakan publik. Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian sengketa konflik ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang nantinya akan menjadi target luaran penelitian ini adalah artikel yang akan pada jurnal internasional bereputasi. Selain itu luaran tambahan berupa rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik yang tentu saja dalam bentuk model/skema teoritis/model deskriptif kualitatif yang akan diberikan kepada objek penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

1.5. Urgensi Penelitian Dengan Skema Penelitian Unggulan Kompetitif

Penelitian yang berjudul Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki urgensi pada keterhubungan antara masalah yang dikaji, temuan yang dihasilkan, dan aplikasi temuan tersebut untuk memperbaiki suatu mekanisme demi terwujudnya kebijakan ketenagakerjaan yang ideal bagi pemerintah, perusahaan dan buruh/pekerja. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam rangka mewujudkan solusi yang tepat guna.

1.6. Keterkaitan Topik Penelitian Dengan Renstra dan RIP Universitas Sriwijaya

Penelitian ini terintegrasi dan berkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sriwijaya Tahun 2017-2023. Penelitian ini adalah penelitian yang masuk dalam kluster penelitian yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat termasuk penelitian kaji tindak pada bidang sosial ekonomi pengembangan teknologi produksi, rancang bangun serta pengembangan model-model interaksi sosial dan perilaku masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Peninjauan persoalan lingkungan dari perspektif Ilmu sosial adalah bentuk pengayaan khasanah publikasi penelitian Universitas Sriwijaya terutama pada *cluster* yang telah disebutkan di atas, khususnya SDGs. Tujuan 8. mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja yang layak bagi

semua. Penerapan Teori dan Teknologi dalam kajian Penelitian dan penyusunan model kebijakan ketenagakerjaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan masyarakat (Peter,1984), dengan definisi ini ada tiga tingkat pengaruh kebijakan publik terhadap kehidupan masyarakat, yaitu : 1). Pada tingkat pertama, adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah, atau yang lain yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, adapun keputusan ini dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, dimana yang dimunculkan pada level ini adalah sebuah kebijakan terapan. 2). Pada tingkat kedua, adanya output kebijakan. Pilihan kebijakan yang sedang diterapkan pada tingkat ini membuat pemerintah melakukan pengaturan, menganggarkan, membentuk personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) Pada tingkat ketiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lebih

lanjut menurut Peter (1984) dalam penerapannya kebijakan publik tersebut memiliki berbagai instrument kebijakan yaitu; 1) Hukum; 2) Pelayanan/Jasa; 3) Dana; 4) Pajak; dan 5) Persuasi yang digunakan bila instrumen lain gagal mempengaruhi masyarakat

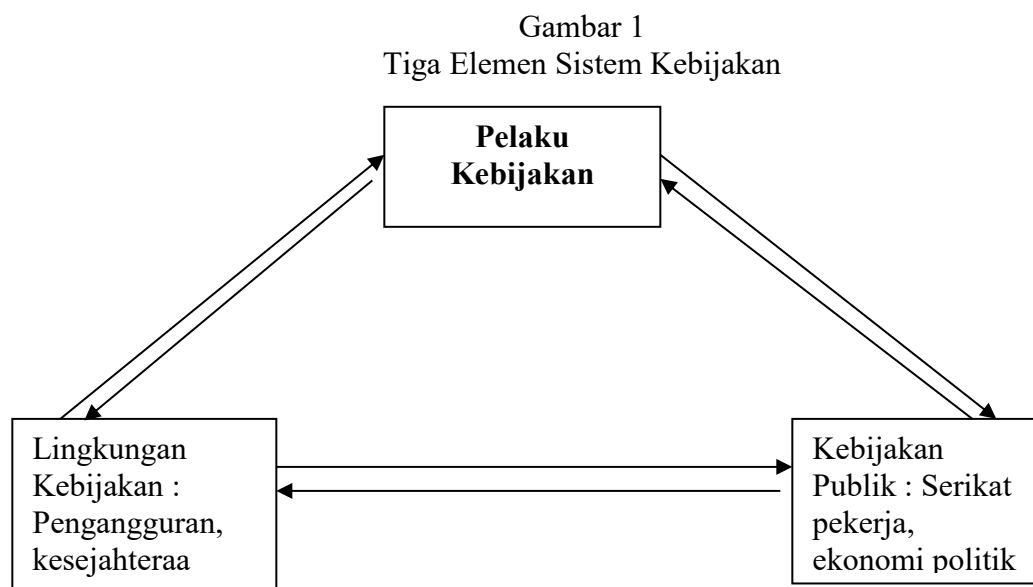
Kebijakan publik menurut Dye (1978) didefinisikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan), selanjutnya Dye (dalam Islamy, 1994) menyatakan bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektifnya), dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintahan saja. Sesuatu yang dilakukan pemerintah dengan tujuan tertentu juga merupakan kebijakan publik, hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah akan memiliki dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, hal yang dilakukan pemerintah tersebut dapat digolongkan menjadi 4 sifat yaitu Organizational, Regulatif, Diskriminatif dan Ekstraktif. Selanjutnya oleh W.Dunn (Dalam Wibawa, 1994:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Menurut James E Anderson (dalam Islamy,1994) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, implikasi dari pengeritan kebijakan publik ini adalah : 1) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) Bahwa kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah; 3) Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan pemerintah untuk dilakukan; 4) Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritarif).

Sejalan dengan hal tersebut David Easton (dalam Dye,1972) mendefinisikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa dan syah kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga hanya pemerintah saja yang syah dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sedangkan menurut Dunn (1994) kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling

berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang kemudian diformulasikan di bidang-bidang isu kebijakan.

Secara luas lebih lanjut Dunn (1994) mendefinisikan analisis kebijakan publik adalah satu diantara sejumlah aktor lainnya dalam sistem kebijakan, suatu sistem kebijakan (policy sistem) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan, seperti pada gambar yang diadopsi dari Dye (1978) berikut ini :



Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. (Dunn, 1994)

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain (Dunn, 1994) yaitu: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*), dimana tahap-tahap tersebut akan dibahas sebagai berikut :

(1). *Agenda Setting*

Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, hakekat permasalahan ditemukan melalui proses yang dikenal dengan nama *problem structuring*. Menurut Peter (1984), bahwa suatu isu kebijakan dapat masuk menjadi agenda kebijakan apabila isu tersebut : 1) Memiliki efek yang besar terhadap masyarakat; 2) Membuat analogi dengan cara mengkiaskannya dengan kebijakan yang telah ada; 3) Menghubungkannya dengan simbol-simbol (nasional/ politik); 4) Terjadinya market failure dan ; 5) Ketersediaan Teknologi bagi penyelesaian masalah tersebut.

Problem structuring didasarkan pada 4 fase pencarian masalah, menurut Dunn (1994) fase tersebut adalah : pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem sfecification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Sedangkan untuk merumuskan masalah dapat digunakan berbagai metode yaitu : analisis batasan masalah, analisis klasifikasi, analisis hirarkis, sinektik, brainstorming, analisis multi perspektif, analisis asumsional, serta pemetaan argumentasi.

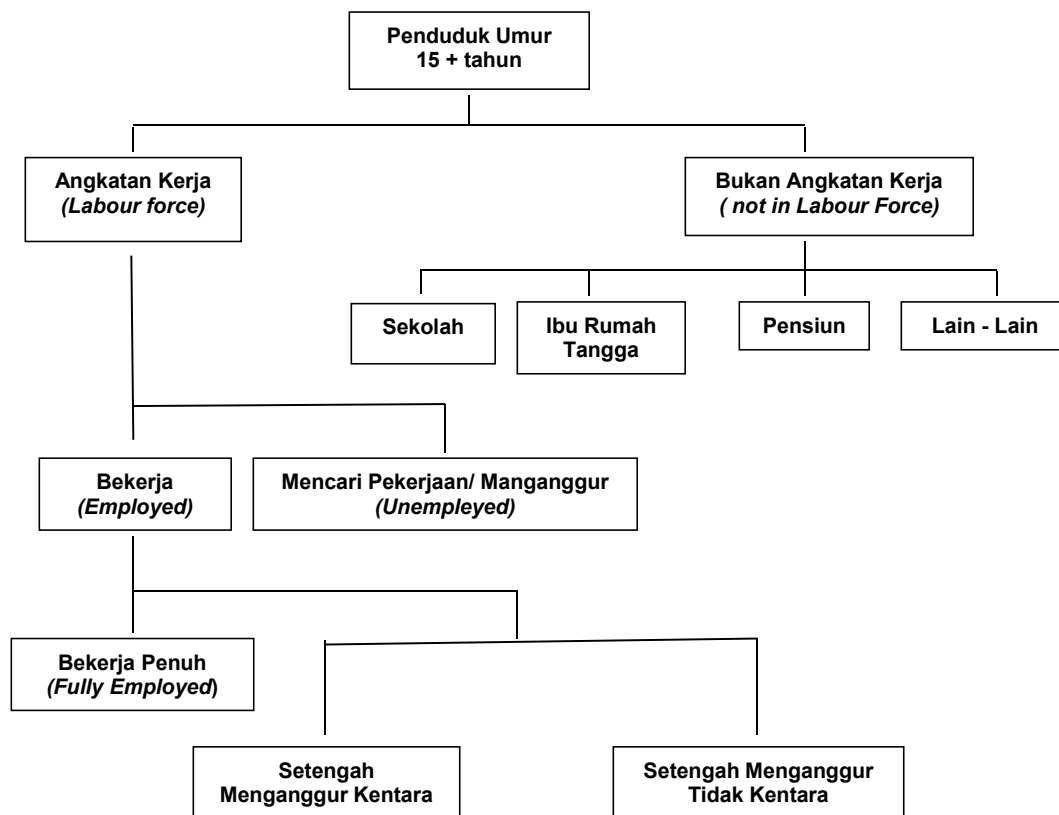
(2). *Policy Formulation*

Pada tahap formulasi kebijakan , para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk itu diperlukan suatu prosedur yang dinamakan forecasting, dimana konsekuensi dari masing-masing pilihan kebijakan dapat diungkapkan. Menurut Peter (1984), formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis memulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis untuk berusaha menjustifikasi bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain, adapun perangkat yang dapat digunakan bagi formulasi kebijakan adalah; 1) Analisis biaya manfaat; 2) Analisis keputusan dimana sebuah keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan keterbatasan informasi. (3). Policy Adaption. Adopsi kebijakan merupakan tahap dimana ditentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders, tahap ini ditentukan setelah melalui proses rekomendasi.

2.2. Konsep Ketenagakerjaan

Batasan konsep ketenagakerjaan memiliki berbagai macam ruang lingkup. Secara normatif, definisi ketenagakerjaan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam regulasi ini pengertian ketenagakerjaan dimaknai sebagai “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama

dan sesudah masa kerja”. Sedangkan, pengertian konsep tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan demikian definisi konsep ketenagakerjaan berkaitan dengan serangkaian aktivitas birokrasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga negara, sedangkan, tenaga kerja berkaitan dengan sumber daya manusia yang ingin atau telah mendapatkan pekerjaan. Berpijak pada landasan yuridis di atas, sesungguhnya eksistensi konsep ketenagakerjaan dapat dijabarkan dalam beberapa konsep dasar sebagaimana, berikut ini.



Sumber : Husni (2003)

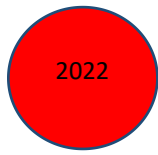
Gambar 2 : Skema Konsep Ketenagakerjaan

Konsep ketenagakerjaan yang tertuang pada gambar 11 di atas dapat dipahami lebih luas berdasarkan perspektif yang beragam yang dikemukakan para ilmuwan. Simanjuntak (1985), misalnya, menjelaskan pengertian tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah, sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan, menurut Husni (2003) tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan (penganggur), sedangkan “bukan angkatan

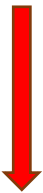
kerja” adalah masyarakat yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Secara khusus, Soeroto (1983) menjelaskan beberapa konsep yang harus dipahami dalam menganalisis aspek kajian ketenagakerjaan. Pertama, tenaga kerja (*manpower*). Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja tertentu dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Kedua, angkatan kerja (*labour force*) yakni tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa. Ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja (*labour force participation rate*) yakni jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur. Keempat, tingkat pengangguran (*unemployment*) yakni angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Kelima, pengangguran terbuka (*open unemployment*). Keenam, setengah menganggur (*under employment*) yakni perbedaan jumlah pekerjaan dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang normal dan mampu dan diinginkannya. Ketujuh, setengah menganggur dengan alasan bekerja tidak tetap (*part time*). Kedelapan, setengah menganggur yang tidak kentara (*invisible unemployment*) yakni bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi pendapatan dan tidak mengembangkan seluruh keahliannya. Kesembilan, pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) yakni angkatan kerja yang dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. Kesepuluh, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahannya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kesebelas, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja terhadap keterampilan dan permintaan tenaga kerja.

2.1. Road-Map Research (Peta Jalan Penelitian)

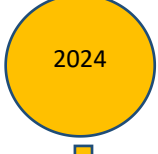
Penelitian Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini adalah bagian penting dari kajian ilmu kebijakan publik dalam perspektif ilmu sosial politik. Terkait dengan hal tersebut, diuraikan bagan peta jalan penelitian secara lengkap dan keterkaitannya dengan RIP dan Renstra Universitas, sebagaimana gambar dibawah ini :



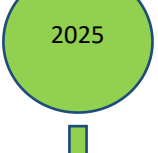
2022



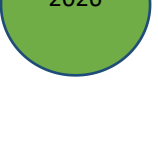
2023



2024



2025



2026

Bagan 1 Road-Map (Peta Penelitian)

Riset dan Penerapan	Teknologi	Produk	Pasar (masyarakat dan Instutusi)
Problem Ketenagakerjaan Di Indonesia & Sumatera Selatan	Penerapan Teori dan Teknologi dalam kajian Penelitian kebijakan ketenagakerjaan	Logbook, Laporan kemajuan, Laporan akhir, artikel seminar internasional, Publikasi Nasional/ Internasional bereputasi	Peneliti, Pemerintah dan masyarakat, Perusahaan.
Penyusunan Model kebijakan Ketenagakerjaan	Penerapan Teori dan Teknologi dalam kajian Penelitian dan penyusunan model kebijakan ketenagakerjaan	Logbook, Laporan kemajuan, Laporan akhir, artikel seminar internasional, Publikasi Nasional/ Internasional bereputasi	Peneliti, Pemerintah dan masyarakat, Perusahaan.
Pengujian Model Model kebijakan Ketenagakerjaan	Penerapan Teori dan Teknologi dalam kajian Penelitian, Pembuktian dan pemantapan model kebijakan ketenagakerjaan	Logbook, Laporan kemajuan, Laporan akhir, artikel seminar internasional, Publikasi Nasional/ Internasional bereputasi	Peneliti, Pemerintah dan masyarakat, Perusahaan.
Pembuatan draft kajian akademik Perda Model kebijakan Ketenagakerjaan	Penerapan Teori dan Teknologi dalam kajian Penelitian, pengusulan penerapan model kebijakan ketenagakerjaan	Logbook, Laporan kemajuan, Laporan akhir, artikel seminar internasional, Publikasi Nasional/ Internasional bereputasi	Peneliti, Pemerintah dan masyarakat, Perusahaan.
Pengajuan Draft Perda Model kebijakan Ketenagakerjaan	Penerapan Teori dan Teknologi dalam kajian Penelitian, Penerapan model kebijakan ketenagakerjaan	Logbook, Laporan kemajuan, Laporan akhir, artikel seminar internasional, Publikasi Nasional/ Internasional bereputasi	Peneliti, Pemerintah dan masyarakat, Perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian “Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah desain deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek atau subyek penelitian dan lain-lain berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan data di masyarakat.

3.2. Unit Analisis Penelitian

Penelitian berjudul Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berada pada Unit analisis pada instansi pemerintah terkait dan beberapa perusahaan yang terlibat.

3.3. Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pegawai Pemerintaah Daerah, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan beberapa perusahaan terkait melalui metode “*snowball approach*”.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data dan sumber data akan di klasifikasikan menurut sifat, jenis, dan sumber datanya secara jelas berbasis metode kualitatif.

3.4.1. Jenis Data

Penelitian Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bersumber pada data :

- a. Data kuantitatif (angka2 yang bersumber dari instansi terkait)
- b. Data kualitatif (wawancara mendalam dengan informan).

Sedangkan sumber data dibedakan penenlitian ini terdiri dari :

- a. Data primer (data yang diperoleh langsung dari objek penelitian), untuk mendapatkan data primer peneliti mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan.

- b. Data skunder (data yang diperoleh secara tidak langsung atau berdasar literatur dan laporan)

3.4.2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini antara lain :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari informan kunci baik pemerintah maupun masyarakat.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang langsung diperoleh dari laporan, dokumen dan publikasi lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan melakukan mengajukan pedoman wawancara baik terstruktur atau tidak terstruktur dan observasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif melalui pengolahan data sebagai bentuk proses untuk mendapatkan data dari setiap pertanyaan penelitian sehingga terjadi pengeditan data, transformasi data dan penyajian data.

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1. Luaran Penelitian

Penelitian berbasis skema unggulan kompetitif mempunyai luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional yang bereputasi **Scopus Q3** atau **Prosiding Scopus yang dipresentasikan** disamping dalam bentuk rekayasa sosial-ekonomi/rumusan pelayanan publik dari hasil penelitian. Bentuk rekayasa dan rumusan kebijakan adalah model rekomendasi teoritis/deskriptif hasil penelitian.

4.2. Target Capaian Penelitian

Luaran penelitian Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Target Capaian Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			TS	TS+1	TS+2
1	Luaran Wajib Publikasi Ilmiah (salah satu)	Jurnal Internasional Bereputasi Scopus Q3	<i>Draft/ Submitted</i>	<i>In-reviewed/ published</i>	
2	Luaran Tambahan	Buku Ajar, Model Deskriptif rumusan hasil penelitian.	Draft/skema model teoritis	Rekomendasi kepada Instansi terkait.	

BAB V

RENCANA ANGGARAN BIAYA

5.1. Anggaran Biaya Penelitian

Adapun total biaya untuk penelitian ini adalah sebesar **Rp. 59.000.000** (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4

Rencana Anggaran Biaya

1. Peralatan Penunjang dan Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
Akomodasi & transportasi pra-survei lokasi penelitian	Persiapan riset	3 keg X 5 org	Rp 325.300	Rp 4.879.500
Akomodasi & transportasi rapat perancangan proposal penelitian	Persiapan riset	3 keg X 5 org	Rp 225.500	Rp 3.382.500
Akomodasi & transportasi pembuatan instrumen riset	Persiapan riset	3 keg X 5 org	Rp 126.500	Rp 1.897.500
Ballpoint Boxi	Field Research	7 buah/tahun	Rp 35.000	Rp 245.000
Notes	Field Research	7 buah/tahun	Rp 33.500	Rp 234.500
Refill Epson L385 Black	Analisis Data	3 buah/tahun	Rp 120.000	Rp 360.000
Refill Epson L385 Colour	Analisis Data	3 buah/tahun	Rp 120.000	Rp 360.000
Tinta Printer	Analisis Data	7 kotak	Rp 32.000	Rp 224.000
Kertas A4	Analisis Data	5 rim/tahun	Rp 50.000	Rp 250.000
Jumlah				Rp 11.833.000
2. Field Research (Pelaksanaan, Akomodasi, Transportasi, Penunjang Kegiatan, dll).				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
Biaya transportasi & akomodasi data sekunder	Aplikasi Pedoman wawancara	6 org selama 4 hari	Rp 125.000	Rp 3.000.000
Biaya transportasi & akomodasi tim peneliti ke lapangan	Wawancara mendalam	6 org selama 10 hari	Rp 125.000	Rp 7.500.000
Biaya transportasi & akomodasi tim peneliti ke lapangan	Wawancara mendalam	6 org selama 10 hari	Rp 124.000	Rp 7.440.000
Biaya Transportasi & Akomodasi Tim Peneliti ke Lapangan	Wawancara mendalam	6 org selama 10 hari	Rp 125.000	Rp 7.500.000
Biaya transportasi & akomodasi tim peneliti ke lapangan	Wawancara mendalam	6 org selama 8 hari	Rp 150.500	Rp 7.224.000
Biaya transportasi & akomodasi tim peneliti ke lapangan	Wawancara mendalam	6 org selama 6 hari	Rp 150.500	Rp 5.418.000
Jumlah				Rp 38.082.000
3. Pengolahan Data, Penulisan Laporan, Publikasi Penelitian				
Kegiatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total

Persiapan studi lapangan		x																
Studi lapangan		X	x	x	x													
Analisis data							x	x	x									
Penulisan laporan kemajuan										x	x							
Presentasi seminar hasil												x						
Perbaikan draf laporan													x	x				
Perancangan artikel ilmiah													x	x				
Penulisan laporan final																	x	x
Pengiriman artikel ke jurnal																	x	x

Sumber: Rencana Tim Peneliti, 2021

6.2. Identitas Tim Peneliti

Tim Peneliti ini terdiri dari peneliti utama dan peneliti pembantu/enumerator dengan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berikut ini adalah identitas peneliti utama dan peneliti pembantu :

Tabel 6
Identitas Peneliti Utama

Ketua Peneliti	
Nama Lengkap	Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP	197905011220021005
Disiplin Ilmu	Administrasi Negara
Pangkat/Golongan	Pembina /IVa
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Fakultas/Jurusan	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara
Bidang Keahlian	Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Manajemen Organisasi
Anggota Peneliti	
Nama Lengkap	Dr. Azhar, SH, M.Sc, LL.M, LL.D,
NIP	196504271989031003
Disiplin Ilmu	Hukum Publik
Pangkat/Golongan	Pembina/ IV a
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Fakultas/Jurusan	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Bidang Keahlian	Sosiologi Hukum
Nama Lengkap	Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM
NIP	196002091986031004
Disiplin Ilmu	Administrasi Publik
Pangkat/Golongan	Penata/ IIID
Jabatan Fungsional	Lektor
Unit Kerja	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Bidang Keahlian	Pelayanan Publik

Sedangkan, nama nama mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Peneliti Pembantu/Enumerator/Petugas Lapangan (Unsur Mahasiswa)

No	Nama	NIM	Jurusan	Fakultas
1.	Antony Marten	07012682024029	S2 MAP	FISIP Unsri
2.	Deslina Wandry	07012622024005	S2 MAP	FISIP Unsri

DAFTAR PUSTAKA

_____, 1998, *Prinsip-Prinsip Administrasi Publik*, Hand out MAP UGM, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, Agus Pramusinto & Yuyun Purbokusumo, 1993, "*Kinerja Organisasi Pelayanan Publik di DIY dan Jateng*", hasil penelitian, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Effendi, Sofian, 1996, "*Revitalisasi Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokrasi Politik*", dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fisipol UGM, Yogyakarta.

Hidayat dan Sucherly, 1986, "*Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah Dan Pegawai Negeri, Kasus Indonesia*", dalam Prisma Nomor 12, Desember, Jakarta.

Kumorotomo, Wahyudi, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

1. LAMPIRAN *CURRICULUM VITAE* KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197905012002121005
5	NIDN	0001057901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 05 Juni 1958
7	E-mail	andries_lionardo@yahoo.co.id
9	Nomor Telepon/HP	Hp. 081233436512
10	Alamat Kantor	Jln. Raya Palembang Prabumulih Km 32 Inderalaya
11	Nomor Telepon/Faks	0711580572
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 230 orang; S-2 = 35 orang; S-3 = - orang
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Sistem Politik Indonesia 2. Kepemimpinan 3. Komunikasi Organisasi 4. Kepemimpinan Strategis & Berfikir Sistem 5. Implementasi Kebijakan Publik.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	Universitas Diponegoro	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Publik	Ilmu Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1997-2001	2004-2006	2007-2010
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Strategi Dinas Pasar Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.	Implementasi Penerapan "New Public Management" di Kabupaten Pekalongan Prov. Jawa Tengah.	Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kota Palembang.
Nama Pembimbing/Promotor	1. Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc 2. Drs. Tri Agus Susanto, SU.	1. Dr. Endang Sulastris 2. Dr. Retno Sunu Astuti.	1. Prof. Dr. Sumartono. 2. Prof. Dr. Bambang Supriyono. 3. Dr. RM. Khairul Muluk.

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Identitas Penelitian	
			Sumber	Status
1	2015	Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Pada Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Seteko dan Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir)	Sateks Unsri	Ketua Peneliti

2	2016	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Oleh Pemerintah Desa Dalam Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir)	Sateks Unsri	Ketua Peneliti
3	2017	Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Sateks Unsri	Ketua Peneliti
4	2017	Efektivitas Fungsi Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam pada Tingkat Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Unggulan Kompetitif Unsri	Anggota Peneliti
5	2018	Model Efektivitas Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Pembangunan Berbasis Lingkungan Tata Ruang Hijau di Kota Palembang	Unggulan Kompetitif Unsri	Ketua Peneliti

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Identitas Pengabdian	
			Sumber	Status
1	2014	Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Melalui Pendekatan Teoritis George Edwards III Pada Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	DIPA Unsri	Anggota Tim
2	2014	Penyuluhan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, & Controlling</i>) Pada Tingkat Pemerintahan Desa di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	DIPA Unsri	Anggota Tim
3	2015	Implementasi Kebijakan Fungsi dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	DIPA Unsri	Ketua Tim
4	2017	Implementasi Prioritas Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	DIPA Unsri	Ketua Tim
5	2018	Impelementasi Kebijakan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pada Pemerintah Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	DIPA Unsri	Ketua Tim

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi

1. Political Concern and Idealism as Mediators for Determining Political Leadership Styles, Scopus Q2, 2019.
2. Accountability of Local Government Policy in Improving Health Service in Respond Industrial Revolution Era 4.0, Scopus Q4, 2020.
3. The Quality Effect of Digital-Based Signature Services on the Performance of the District Government, Scopus Q3, 2020.

4. Leadership Management : Youth Competencies and Perspective on the Policy in Indonesia, Scopus Q4, 2020
5. Labor social capital and human resource management for eucalyptus oil supply chain, Scopus Q4, 2020
6. Social Ecology and Survival among Multi-Ethnic Youth in Urban Areas, Scopus Q2, 2020
7. Diversity of Urban Socio-Ecological Support Among Multi-Ethnic Youth In Urban Areas, Scopus Q4, 2020
8. Ecological Intelligence : Waste Saving Movements in Prabumulih City, Scopus Q3, 2020
9. Social Capital of Eucalyptus Oil Workers, Scopus Q2, 2020
10. Prevalence of anxiety and depression the impact of type 2 diabetes Mellitus : Study of Health Policy Analysis in improving the Quality of Life of Poor Families living in The urbanization area of west Lombok, Indonesia, Scopus Q2, 2020
11. The Nurses role in Educating the prevention of transmission of the COVID 19 : Study on Improving the healthy living among urban Communities, Scopus Q2, 2020
12. Administration Healthcare System : Advancing the Knowledge and Skill of Nurses Professional Working with Family Caregiver of Mental Illnes, Scopus Q2
13. Determinant the quality of Life with Schizophrenic Disorder Living In the Community : Health Policy to Improve NursePerformance, Scopus Q2, 2020
14. Effective Implementation Marketing Management of Hospital Pharmacy : A Study on the Impact of Hospital Service Quality Improvement in Enhancing the Patients Satisfaction and Loyalty, Scopus Q2
15. Capacity of Local Food Institution in Realizing Sustainable Food Security, Scopus Q3, 2020
16. Agricultural Land Conversion and The Influence of the Food Supply Chain, Scopus Q4, 2020
17. An Effectiveness Service Model of Policy of Building Permit (IMB) Based on A Green Spatial Environment in Palembang City, Prosiding Scopus, 2020
18. Local Government Income Revenue: A Brief Study of the Policy Impact of Pandemic Covid-19 on Tourism Recovery, Prosiding Scopus, 2020
19. THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT ON POLICY NATIONAL FOOD SECURITY: Study of the Effects of Agricultural Product Distribution by Poor Farmers on the Pandemic Covid 19, Prosiding Scopus, 2020
20. Knowledge and attitudes of nursing students in the college of health in the face of global pandemic Covid - 19 : Community empowerment in preventing epidemic disease, Prosiding Scopus, 2020

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Usulan Penelitian Unggulan Kompetitif Universitas Sriwijaya Tahun 2021**.

Palembang, 11 Mei 2023
Ketua Pengusul,

TTD

Dr Andries Linonardo, S.IP., .M.Si.
NIP. 197905012002121005

2. Anggota Pengusul I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Azhar, SH, LLM, LLD
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196504271989031003
5	NIDN	0024075404
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 4 Mei 1965
7	E-mail	azhar@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/HP	087798958035
9	Alamat Kantor	Fisip Unsri/ Jl. Palembang-Prabumulih KM 32
10	Nomor Telepon/Faks	0711 580572
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = ±70 lulusan
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Metode Penelitian 2. Sosiologi 3. Sistem Hukum Indonesia 4. Pelayanan Publik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	Universitas Tokyo	Universitas Tokyo
Bidang Ilmu	Ilmu Sosiologi	Ilmu Sosiologi	Ilmu Sosiologi

Indralaya, 11 Mei 2023
Anggota Pengusul II,

TTD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP : 197905011220021005
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Pangkat/Golongan : Pembina /IVa
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jalan Kebun Bunga Km 9 No.1830 Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul “Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ” yang diusulkan dalam jenis Penelitian Unggulan Kompetitif Tahun 2023 bersifat Original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Sriwijaya

Palembang, 16 Februari 2023
Yang Menyatakan,



Syamsuryadi, S.Si, M.Kom, Ph.D.
NIP.197102041997021003

Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si
NIP. 197905011220021005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP : 197905011220021005
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Pangkat/Golongan : Pembina /IVa
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jalan Kebun Bunga Km 9 No.1830 Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul “Model Kebijakan Penyelesaian Sengketa Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ” yang diusulkan dalam jenis Penelitian Unggulan Kompetitif Tahun 2022 akan diterbitkan pada jurnal Internasional bereputasi **SCOPUS Q3**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Sriwijaya

Palembang, 11 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Syamsuryadi, S.Si, M.Kom, Ph.D.
NIP.197102041997021003

Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si
NIP. 197905011220021005

Lampiran 1b:

FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

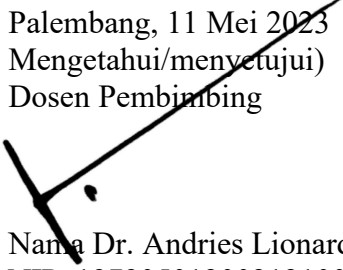
Nama Mahasiswa/i	: Deslina Wandry
NIM	: 07012622024005
Tempat/Tgl lahir	: Kayu Agung/ 7 Mei 1990
Prodi	: Magister Administrasi Publik
Semester ke	: 3 (Tiga)
Agama	: Islam
Kawin/Tdk kawin*)	: Belum Kawin
Jenis Kelamin: L/P*)	: P
jumlah sks yg telah ditempuh	: 31 SKS
IPK	: 3,94
Telepon / HP	: 081373061551
Alamat tinggal	: JL. Sulaiman Amin Komp. Pemda Blok F4 No.7 Rt.38 Rw.12 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang- Alang Lebar Palembang
Nama Orang Tua/wali	: Wandry ZA, S.IP. M.Si
Alamat	: JL. Sulaiman Amin Komp. Pemda Blok F4 No.7 Rt.38 Rw.12 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang- Alang Lebar Palembang
Telepon / HP	: 082282457652

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Unggulan Kompetitif Tahun 2023 :

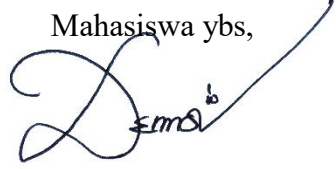
- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Judul kegiatan penelitian yang diusulkan | : Penelitian Kompetitif tahun 2021 |
| b. Nama Dosen Pengusul | : Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si |
| c. Jurusan/Fakultas | : Ilmu Komunikasi |
| d. Jenis Kegiatan | : Penelitian |

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Palembang, 11 Mei 2023
Mengetahui/menyetujui)
Dosen Pembimbing


Nama Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si
NIP. 197905012002121005

Mahasiswa ybs,



Deslina Wandry
NIM 07012622024005

Mengetahui/menyetujui
Ketua Jurusan/Program Studi

TTD

Nama : Dr. Raniasa Putra, S,IP, M.Si
NIP. : 197805122002121003

Lampiran 1b:

FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/i	: Silvia Novi, S.IP
NIM	: 07012622024004
Tempat/Tgl lahir	: Palembang/5 Maret 1995
Prodi	: Magister Administrasi Publik
Semester ke	: 3 (Tiga)
Agama	: Islam
Kawin/Tdk kawin*)	: Tidak Kawin
Jenis Kelamin: L/P*)	: P
jumlah sks yg telah ditempuh	: 31 SKS
IPK	: 4,0
Telepon / HP	: 082178901995
Alamat tinggal	: JL. KH Wahid Hasyim Lr. Terusan 1, no. 1642, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang
Nama Orang Tua/wali	: Sardamin, S.Sos
Alamat	: JL. KH Wahid Hasyim Lr. Terusan 1, no. 1642, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang
Telepon / HP	: 081367912555

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Unggulan Kompetitif Tahun 2023 :

- | | |
|---|------------------------------------|
| e. Judul kegiatan penelitian yang diusulkan | : Penelitian Kompetitif tahun 2021 |
| f. Nama Dosen Pengusul | : Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si |
| g. Jurusan/Fakultas | : Ilmu Administrasi Publik |
| h. Jenis Kegiatan | : Penelitian |

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Palembang, 23 Januari 2023
Mengetahui/menyetujui)
Dosen Pembimbing


Nama Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si
NIP. 197905012002121005

Mahasiswa ybs,



NIM 07012622024004

Mengetahui/menyetujui
Ketua Jurusan/Program Studi

TTD

Nama : Dr. Raniasa Putra, S,IP, M.Si
NIP. : 197805122002121003